

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN 3 OSP 1 JAWA TENGAH

A. PENDAHULUAN

Program kotaku di Jawa Tengah 1 dilaksanakan di 20 kabupaten/kota. Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kabupaten/kota terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kelurahan/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. Kegiatan pengembangan penghidupan dilakukan di lokasi terpilih.
4. Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2).

Seleksi Kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan investasi infrastruktur tingkat kota akan dipilih Kabupaten/Kota dari criteria karakteristik penduduk, luas permukiman kumuh, kebutuhan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan dasar dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Adapun tata cara seleksi diatur secara terpisah dalam surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Tim OSP memberikan dukungan kepada PMU dan PIU dalam lingkup pekerjaan berikut ini, namun tidak terbatas kepada:

1. Memastikan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program serta target KPI di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
2. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perencanaan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan, termasuk di antaranya kawasan permukiman kumuh;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembiayaan program dan kegiatan kolaborasi kelembagaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
4. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan komunikasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
5. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan;
6. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan manajemen keuangan dan dukungan penghidupan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan;
7. Melakukan pemantauan dan pengendalian program (monitoring) di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan, termasuk pelaksanaan uji petik, pengelolaan data dalam MIS/GIS dan pelaporan;
8. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan PMU/PIU, Satker/PPK Provinsi dalam melakukan administrasi proyek, seleksi dan rekrutmen, kontrak, penilaian kinerja dan pembayaran tenaga ahli, tim koordinator kota dan tim fasilitator secara berkala;
9. Berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan PMU/PIU, Satker/PPK Provinsi dan/atau Satker/PPK Kota dalam mengelola pelaksanaan program di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan;
10. Memastikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lanjutan atau tambahan, jika dibutuhkan sesuai dengan panduan;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh PMU dan/atau Satker.

Capaian KPI Triwulan 3 Bulan Juli - September 2019 dari analisa hasil keluaran data SIM periode bulan September 2019 masih banyak indicator yang belum tercapai diantaranya adalah Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan infrastruktur realisasi capaiannya 482.406, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air minum realisasi capaiannya 21.526, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak realisasi capaiannya 16.856, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 realisasi capaiannya 334.380, Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan realisasi capaiannya 157.142, dan Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan drainase realisasi capaiannya 202.577. Hal ini dikarenakan pekerjaan fisik 2019 di lapangan masih terlaksana. Berikut capaian KPI OSP 1 Jawa Tengah 1 pada Triwulan 3 Bulan Juli - September 2019.

Capaian KPI Program Kota Tanpa Kumuh Jawa Tengah

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	GAP
INDIKATOR HASIL (PDO Indicators)					
1	Masyarakat di kawasan kumuh yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan infrastruktur	orang (persons)	952.429	482.406	470.023
2	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses air minum : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	56.463	21.526	34.937
3	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses sanitasi layak : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	87.428	16.856	70.572
4	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan akses jalan sepanjang waktu dalam radius 500 m : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	357.594	334.380	23.214
5	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan persampahan : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	159.119	157.142	1.977
6	Masyarakat yang mendapat perbaikan/peningkatan pembangunan drainase : Dipilah laki-perempuan	orang (persons)	448.643	202.577	246.066
7	Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	1.711		
8	Persentase masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur perkotaan	%			
9	Persentase pengaduan masyarakat tertangani dan selesai	%	90%	100%	
10	Pokja PKP tingkat Kab/Kota dan Provinsi terbentuk dan berfungsi	%	80%	45%	
11	Jumlah penerima manfaat langsung program	orang (persons)	938.394	525.376	
12	Jumlah penerima manfaat perempuan program	orang (persons)			
INDIKATOR HASIL ANTARA (Intermediate Results Indicators)					

NO	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi	GAP
1. Komponen-1 : Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan <i>(Institutional and Policy Development)</i>					
1,1	Pokja PKP tingkat nasional terbentuk dan berfungsi	ya (yes)		ya (yes)	
1,2	Tersedianya database/Profil kawasan permukiman kumuh	ya (yes)	Ya	ya (yes)	
2. Komponen-2: Dukungan perencanaan terintegrasi and Penguatan kapasitas bagi pemda dan masyarakat <i>(Integrated Planning Support and Capacity Building for Local Government and Communities)</i>					
2,1	Persentase pemda yang telah menyelesaikan dokumen SIAP/RP2KP-KP dan telah disahkan oleh Bupati/Walikota	%	90%	85%	
2,2	Persentase kelurahan yang telah menyelesaikan dokumen RPLP dan telah dikonsolidasikan kedalam dokumen SIAP/RP2KP-KP	%	90%	100%	
3. Komponen-3 : Infrastruktur Perkotaan dan pelayanan di Kota Prioritas <i>(Urban infrastructure and services in selected cities)</i>					
3,1	Jumlah kota yang telah menyelesaikan 80% pembangunan infrastruktur primer dan sekunder dan pelayanan yang terhubung dengan kawasan kumuh	Kota (cities)	11	8	
3,2	Jumlah kelurahan yang telah menyelesaikan 90% pembangunan infrastruktur tersier dan pelayanan di kawasan kumuh	kelurahans	129	3	
3,3	Persentase infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	%	95%		
3,4	Persentase infrastruktur yang dibangun berfungsi baik	%	85%		
4. Komponen-4 : Dukungan pelaksanaan dan Bantuan Teknis <i>(Impelemntation support and Technical Assistance)</i>					
4,1	Persentase pemda yang memiliki struktur monitoring dan mengembangkan sistem informasi pelaksanaan proyek secara teratur	%	90%		
4,2	Persentase kelurahan yang telah melaksanakan audit keuangan tahunan	%	95%	91%	4%

Kebutuhan dana BPM tahun 2019 di wilayah Jateng-1 berjumlah Rp 172 Miliar, sementara dana yang tersedia di DIPA PIP baru Rp. 45.150 Miliar. Lokasi BPM tahun 2019 tersebar 129 kel/desa di 19 kota/kabupaten. Jika dilihat dari kesiapan pencairan berdasarkan kelengkapan administrasi Pejabat Inti Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIS Satker PIP) Kabupaten/Kota ada potensi beberapa kabupaten/Kota tidak bisa menyerap DIPA Original (DIPA awal) karena adanya perubahan Pejabat Inti Satker PIP [usulan baru]. Hal ini berakibat ada 6 kabupaten/kota yang belum dapat mencairkan DIPA 2019 sesuai target bulan Agustus 2019. Karena SK Satker baru terbit tanggal 31 Juli 2019.

Serapan DIPA PIP Kabupaten/Kota Wilayah Osp 1 Jawa Tengah 1

KD_KAB	NAMA_KAB	PAGU BPM/BDI TA.2019			Jml_Kel BPM	SPM				E-MON				SP2D			
		PAGU	DIPA OR	DIPA REV		T1		T2		T1		T2		T1		T2	
						Jml_K	Nilai	Jml_K	Nilai	Jml_K	Nilai	Jml_K	Nilai	Jml_K	Nilai	Jml_K	Nilai
3307	WONOSOBO	1.500.000	-	1.500.000	1	1	1.050.000	-	-	1	1.050.000	-	-	1	1.050.000	-	-
3315	GROBOGAN	500.000	-	500.000	1	1	350.000	1	150.000	1	350.000	1	150.000	1	350.000	1	150.000
3316	BLORA	2.000.000	700.000	2.000.000	2	2	1.400.000	-	-	2	1.400.000	-	-	2	1.400.000	-	-
3317	REMBANG	6.500.000	1.050.000	6.500.000	6	6	4.550.000	2	600.000	6	4.550.000	2	600.000	6	4.550.000	2	600.000
3318	PATI	1.500.000	2.100.000	1.500.000	2	2	1.050.000	2	450.000	2	1.050.000	2	450.000	2	1.050.000	2	450.000
3319	KUDUS	6.000.000	6.300.000	6.000.000	6	6	4.200.000	5	1.500.000	6	4.200.000	2	750.000	6	4.200.000	2	750.000
3320	JEPARA	3.500.000	1.050.000	3.500.000	3	3	2.450.000	3	1.050.000	3	2.450.000	2	750.000	3	2.450.000	3	1.050.000
3321	DEMAK	10.000.000	700.000	10.000.000	10	10	7.000.000	10	3.000.000	10	7.000.000	10	3.000.000	10	7.000.000	10	3.000.000
3322	SEMARANG	8.000.000	1.050.000	8.000.000	6	6	5.600.000	-	-	6	5.600.000	-	-	6	5.600.000	-	-
3323	TEMANGGUNG	30.000.000	-	30.000.000	20	20	21.000.000	12	5.550.000	20	21.000.000	12	5.550.000	20	21.000.000	12	5.550.000
3324	KENDAL	5.500.000	1.400.000	5.500.000	5	5	3.850.000	2	600.000	5	3.850.000	-	-	5	3.850.000	2	600.000
3325	BATANG	5.500.000	1.050.000	5.500.000	3	3	3.850.000	3	1.650.000	3	3.850.000	3	1.650.000	3	3.850.000	3	1.650.000
3326	PEKALONGAN	30.000.000	2.800.000	30.000.000	21	21	21.000.000	9	3.450.000	21	21.000.000	7	2.550.000	21	21.000.000	7	2.550.000
3327	PEMALANG	16.000.000	2.800.000	16.000.000	11	11	11.200.000	8	3.000.000	11	11.200.000	6	2.250.000	11	11.200.000	6	2.250.000
3328	TEGAL	14.500.000	1.400.000	14.500.000	11	11	10.150.000	9	3.750.000	11	10.150.000	5	1.950.000	11	10.150.000	7	3.150.000
3329	BREBES	5.000.000	1.050.000	5.000.000	3	3	3.500.000	3	1.500.000	3	3.500.000	-	-	3	3.500.000	-	-
3374	KOTA SEMARANG	4.500.000	11.900.000	4.500.000	5	5	3.083.500	2	450.000	5	3.083.500	2	450.000	5	3.083.500	2	450.000
3375	KOTA PEKALONGAN	11.000.000	7.000.000	11.000.000	7	7	7.154.000	1	300.000	7	7.154.000	1	300.000	7	7.154.000	1	300.000
3376	KOTA TEGAL	10.500.000	2.800.000	10.500.000	6	6	7.350.000	5	2.550.000	6	7.350.000	5	2.550.000	6	7.350.000	5	2.550.000
	19	172.000.000	45.150.000	172.000.000	129	129	119.787.500	77	29.550.000	129	119.787.500	60	22.950.000	129	119.787.500	65	25.050.000

Secara keseluruhan 19 Kota/Kab dapat berproses SPM dan SP2D untuk 129 Kelurahan sudah menyelesaikan proses pencairan Tahap 1 senilai 119,78 Milyar, Capaian emon pada bulan September 2019 untuk Tahap 1 tidak ada deviasi. Tahap 2 sudah 77 Kelurahan yang tersebar di kota/kab OSP1 Jawa Tengah senilai 29,5 M masih mengalami deviasi emon sebesar 6,6 M. Selanjutnya apabila dilihat dari Kebutuhan dana BPM tahun 2019 di wilayah Jateng-1 berjumlah Rp 172 Milyar, masih menyisakan yang belum menyerap DIPA TA.2019 22,6 Milyar yang akan menjadi target cair sampai Bulan Oktober 2019.

Tujuan uji petik

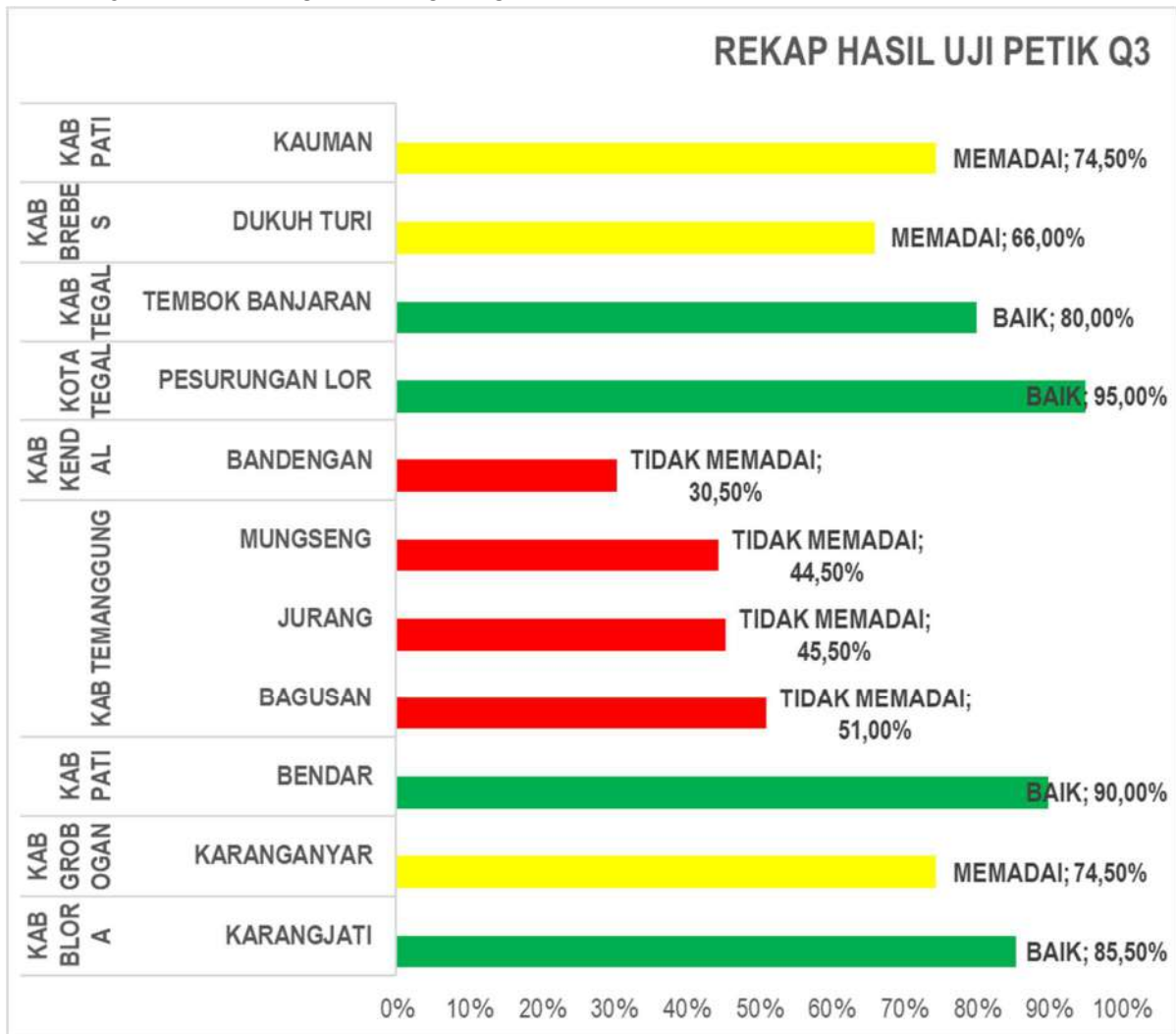
Tujuan uji petik (spot check), untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai kerangka waktu yang direncanakan dan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman program. Dan sebagai bagian dari upaya pengendalian serta pemastian untuk menghasilkan output yang berkualitas serta pencapaian outcome yang optimal. Bila ditemukan penyimpangan (deviasi) pada saat uji petik, maka dilakukan saran/rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pelaku di tingkat lapangan dalam kurun waktu yang disepakati bersama

Rekapitulasi Lokasi uji petik

Realisasi Pelaksanaan Ujipetik dilakukan di OSP 1 Jateng sebanyak 10 kelurahan/Desa, dengan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 27 Juni 2019, Realisasi Sebaran lokasi kab dan kelurahan/desanya ;

KD_KAB	NAMA_KAB	Jml_Kel BPM	Uji Petik	
			Q3	Keterangan
3315	GROBOGAN	1	KARANGANYAR	20190919
3316	BLORA	2	KARANGJATI	20190918
3318	PATI	2	BENDAR	20190806
			KAUMAN	20190828
3323	TEMANGGUNG	20	BAGUSAN	20190723-24
			JURANG	20190723-24
			MUNGSENG	20190723-24
3324	KENDAL	5	BANDENGAN	20190725-26
3326	PEKALONGAN		KAWASAN BUARAN	20190916-16
3327	PEMALANG		KAWASAN GUMELEM	20190916-17
3328	TEGAL	11	TEMBOK BANJARAN	20190809
3329	BREBES	3	DUKUHTURI	20190808
3376	KOTA TEGAL	6	PESURUNGAN LOR	20190806-07
	10	50	13	13

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU



Dari hasil rekapitulasi instrument pelaksanaan kegiatan uji petik diatas yang terdiri dari Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan BPM dan Kinerja Kelembagaan antara lain adalah Akuntabilitas Pemanfaatan BPM, Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan, Kinerja kelembagaan dan Aspek Kualitas Pemanfaatan BPM Infrastruktur Skala Lingkungan antara lain adalah Tertib / Kelengkapan Administrasi, Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM, Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik, Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak social, KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik yang terealisasi di OSP 1 Jawa Tengah di 11 Kelurahan yang tersebar di 10 Kota/Kab 2 diantaranya kegiatan uji petik skala kawasan.

Dari pelaksanaan kegiatan uji petik secara keseluruhan di 11 Kelurahan dengan kinerja Baik hanya di 4 Kelurahan ; Tembok Banjaran Kab Tegal, Pesurungan Lor Kota Tegal, Bendar Kab Pati dan Karangjati Kab Blora. Kinerja Memadai hanya di 3 Kelurahan ; Kauman Kab Pati, Dukuh Turi Kab Brebes dan Karanganyar Kab Grobogan. Kinerja Tidak Memadai di 4 Kelurahan ; Bandengan Kab Kendal, Mungseng, Jurang dan Bagus an Kab Temanggung. Kinerja Tidak Memadai dikarenakan belum dilaksanakan kegiatan fisik atau baru dilaksanakan proses pencairan.

2.1.2	Apakah ditingkat Kel/Desa/BKM sudah ada RPLP	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.1.3	Apakah Daftar investasi didalam RPLP sudah ada yang dilaksanakan tahun 2016-2018	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.1.4	Dari mana saja sumber pembiayaan kegiatan kolaborasi (non BDI) tersebut	BanKeu Prov, APBD Kab, DAK, aspirasi	DAK Perumahan dan Sanitasi	Dana Desa	Dana Desa		Dana Desa		APIK [Akselerasi Percepatan Infrastruktur Kota]	Dana Desa	Dana Desa	APBD, Dana Desa
2.1.5	Bagaimana prosesnya sehingga kegiatan kolaborasi (non BDI) bisa membiayai daftar investasi yang ada di RPLP	musrenbangkel dan kec, RWT,	Musrenbang	Musrenbang	Musrenbang				Musrenbang	Musrenbang	Musrenbang	
2.1.6	Apakah sudah ada identifikasi rencana kegiatan kolaborasi (non BDI) tahun 2019	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
2.1.7	Apakah RPLP menjadi salah satu acuan dalam Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3. Kinerja kelembagaan												
3.1. Rencana kerja KPP berjalan		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
3.1.1	Apakah rencana kerja dinilai sudah berjalan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
3.1.2	Apakah KPP memiliki sumber pendanaan untuk pemeliharaan/biaya operasional	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.2. Penilaian Perkembangan Organisasi LKM		100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
3.2.1	Apakah sudah dilaksanakan FGD PPO BKM	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.2.2	Apakah penilaian PPO LKM dilakukan dengan melibatkan minimal unsur LKM, dan aparat kelurahan/desa, perwakilan Lembaga, KSM	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.2.3	Apa kesimpulan (awal-Berdaya-Mandiri-Menuju madani) dari hasil PPO BKM sesuai kondisi sebenarnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.2.4	Adakah ada rekomendasi hasil FGD PPO BKM?	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
PERSENTASE PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN		96,00%	76,00%	96,00%	63,00%	55,00%	63,00%	43,00%	90,00%	80,00%	67,00%	67,00%
B. PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN												
1. Tertib / Kelengkapan Administrasi												
1.1. Administrasi KSM/Panitia		100,00%	85,00%	85,00%	30,00%	15,00%	15,00%	0,00%	100,00%	100,00%	60,00%	60,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
1.1.1	Apakah ada rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD)	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak

1.1.2	Apakah ada laporan keuangan (Buku Kas, buku Material)	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1.1.3	Apakah sudah dibuat LPJ KSM/Panitia	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
1.1.4	Apakah dokumen Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL) ada/lengkap dan sudah di tandatangan oleh semua pihak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1.1.5	Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
1.1.6	Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan MP2K	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
1.1.7	Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan Praktek Lapangan (OJT)	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
2. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Kualitas Perencanaan Teknis		100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
2.1.1	Apakah dokumen perencanaan teknis / usulan kegiatan skala lingkungan ada dan lengkap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
2.1.2	Apakah lembar verifikasi dan berita acara verifikasi usulan kegiatan ada dan sudah di tanda tangan oleh staker/PPK/pokja PKP dan askot infrastruktur	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
2.1.3	Apakah ada dokumen pengadaan bahan/alat/jasa (lampiran 1-7 dan format 1-4)	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
2.1.4	Apakah dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Skala Lingkungan ada dan Lengkap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya
3. Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan		25,00%	70,00%	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
3.1.1	Apakah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RKS	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
3.1.2	Apakah volume setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume yang direncanakan	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
3.1.3	Apakah bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab kualitas pekerjaan)	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
3.1.4	Apakah cara pelaksanaan setiap pekerjaan memenuhi persyaratan cara kerja sesuai standar teknis/RKS	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya

3.1.5	Apakah penggunaan tenaga kerja/peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis/RKS	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
3.1.6	Apakah pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh Mandor/Kepala Tukang	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
3.1.7	Apakah jumlah biaya yang dimanfaatkan sesuai dengan biaya pelaksanaan yang telah direncanakan	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
4. Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Kelengkapan dokumen Safeguard		50,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
4.1.1	Apakah dokumen pengelolaan dampak lingkungan sudah ditindak lanjuti	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
4.1.2	Apakah ada dokumen untuk perolehan lahan (form-2)	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
4.1.3	Apakah infrastruktur yang dibangun sudah mempertimbangkan terhadap aspek gender	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
4.1.4	Apakah penggunaan kayu dengan volume lebih dari 3 m3 sudah dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti SKHH, FAKO atau Surat keterangan asal kayu oleh Kepala Desa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Tidak
5. KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. KPP dan Realisasi Pemeliharaan		100,00%	85,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%
No.	Instrumen	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban	Jawaban
5.1.1	Apakah telah dibentuk KPP dan dituangkan dalam Berita Acara	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.1.2	Apakah KPP telah memiliki rencana kegiatan pemeliharaan dan kesepakan pendanaannya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
5.1.3	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun masih ada	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.1.4	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dalam kondisi baik	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.1.5	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih berfungsi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.1.6	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dimanfaatkan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.1.7	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun dikembangkan/ditingkatkan	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
PERSENTASE PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN		75,00%	73,00%	84,00%	39,00%	36,00%	26,00%	18,00%	100,00%	80,00%	65,00%	82,00%

KINERJA

A. Akuntabilitas Pelaksanaan BPM dan Kinerja Kelembagaan

B. Kualitas Pemanfaatan BPM Infrastruktur Skala Lingkungan

96,00%	76,00%	96,00%	63,00%	55,00%	63,00%	43,00%	90,00%	80,00%	67,00%	67,00%
75,00%	73,00%	84,00%	39,00%	36,00%	26,00%	18,00%	100,00%	80,00%	65,00%	82,00%
85,50%	74,50%	90,00%	51,00%	45,50%	44,50%	30,50%	95,00%	80,00%	66,00%	74,50%
			TIDAK MEMADA	TIDAK MEMAD	TIDAK MEMADAI	TIDAK MEMADAI			MEMAD	MEMAD
BAIK	MEMADAI	BAIK	I	AI	MEMADAI	MEMADAI	BAIK	BAIK	AI	AI

TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
Audit KAP	Audit KAP telah dilaksanakan seluruhnya	Selesai opini 49 BKM, namun yang telah diupload baru 43 BKM [Kab Pati]	Upload pelaksanaan Audit 2019
BPKP	Progress BPKP cukup baik	temuan Administrasi sudah tuntas (masi akan dicek); temuan pengembalian dana sebesar Rp 40.764.200 telah disetor lke kas Negara sebesar Rp 22.341.700, masih kurang sebesar Rp..18.422.500.tdd Doropayung Rp 3.856.500; Panjuran Rp 2.107.000; Growong Lor sebesar Rp 8.900.000 dan Margomulyo sebesar Rp 3.559.000 [Kab Pati]	Margo mulyo, insyaallah Selasa diserahkan ke Satker
Administrasi KSM	<ul style="list-style-type: none"> Pembukuan KSM sudah ada Berita Acara Pelaksanaan MP2K sudah ada Papan informasi Penilaian kinerja KSM 	<ul style="list-style-type: none"> Namun BKM/BKK/Nota belum lengkap Namun masih bersifat normative Papan Proyek belum ada Form penilain Kinerja KSM belum sesuai dengan form standar 	<ul style="list-style-type: none"> Team faskel mendampingi pembuatan BKM/LKM dan noata-nota yang akuntabel (sudah ditulis pakai pulpen dan tanda tangan ketua KSM) Dilengkapi materi MP2KP Papan proyek segera diadakan (standar + pengaduan Form PK standard dan setiap minggu dilakukan pengukuran kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> Bukti Pembayaran Upah Pekerja (HOK) belum memadai, belum melampirkan Daftar Hadir Perhitungan Upah Pekerja, sehingga diketahui jumlah pekerja dan total upah yang dibayarkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti Kas Keluar Pembayaran Upah Tenaga (HOK) harus melampirkan Daftar Hadir Perhitungan Upah Pekerja, sehingga diketahui jumlah

TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	REKOMENDASI
			pekerja dan total upah yang dibayarkan.
		<ul style="list-style-type: none"> Pencatatan Pembukuan KSM Ben Toto, KSM Legowo, KSM Harapan Bersama, KSM Ben Sae Buku Dana Kegiatan Infrastruktur dan Swadaya belum dibuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Buku Dana Kegiatan Infrastruktur dan Swadaya KSM Ben Toto, KSM Legowo, KSM Harapan Bersama, KSM Ben Sae dibuat, salinan Buku DKIS dikirimkan ke KMP .
		<ul style="list-style-type: none"> Bukti Pemindahbukuan transaksi non kas disekretariat BKM belum dibuat oleh sekretaris BKM. 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti Pemindah Bukuan Transaksi Non Kas dilengkapi , salinan dokumen dikirimkan ke KMP Wilayah 2.
		<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Down Payment U-DITH untuk KSM Ben Tata, KSM Ben Sae, KSM Legowo, KSM Harapan Bersama melebihi 20%, pada saat pembayaran DP belum merujuk di POS Pengadaan Barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Diperintahkan ke pada KSM Ben Toto, KSM Legowo, KSM Harapan Bersama dan KSM Bensae untuk menarik kembali kelebihan pembayaran (transfer) down payment (DP) dari Penyedia Jasa .
Kwalitas doukumen Perencanaan Teknis	Dokumen perencanaan teknis ada	Kelengkapan masih kurang dan terkesan sekedar disusun	Melengkapi kualitas Dokumen perencanaan
Pembentukan KPP dan Realisasi Pemeliharaan	KPP telah terbetuk	Rencana kerja belum ada maupun kesepakatan dana belum ada	Rencana kerja di update
Pemanfaatan BPM 2019	Pekerjaan saluran	Pekerjaan pemasangan saluran UDITH dilakukan tanpa didahului timbunan sirtu sebagaimana ditetapkan didalam RAB.	Lakukan pekerjaan ulang dengan melakukan penimbunan sirtu.
	Kab Temanggung [23-24 Juli 2019], Belum ada yang mulai pelaksanaan fisik	9 Kelurahan akan memulai pelaksanaan Fisik pada tanggal 29 Juli 2019, dan 11 Kelurahan akan mulai pelaksanaan tanggal 4 Juli 2019	Target mulai pelaksanaan fisik untuk semua kelurahan paling lambat tanggal 4 Agustus 2019
	Safeguard	Rambu Keselamatan (Safeguard) belum ada, Tukang dan Pekerja Proyek belum memakai APD (Alat Pengaman Diri)	KSM membuat rambu Pengaman minimal di 3 titik/tempat Lokasi Proyek/Kegiatan dan diharpkan pekerja memakai APD

KAWASAN GUMELEM – KABUPATEN PEMALANG

NO.	TOPIK	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	KEGIATAN SKALA KAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen LARAP telah terkirim ke KMP; - Dokumen proses penyusunan LARAP belum lengkap; - Penanganan WTP berupa pembongkaran dan perapian aset WTP utk kegiatan Clean and Clear telah dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga WB akan melakukan penelusuran/Due Diligence terhadap WTP yang sudah tertangani tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen proses masih berada di Pokja dan pendokumentasian proses penyusunan LARAP tidak satu pintu; - PEMDA sudah menganggarkan untuk pembongkaran bangunan WTP dan perapiannya pada APBD Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen proses penyusunan LARAP dilengkapi sebelum Due Diligence dilaksanakan oleh WB di Pemalang; - Memastikan bahwa WTP telah menerima dengan “legowo” proses pembongkaran dan perapian bangunan terdampak dilaksanakan pada tahun 2018 dan sesuai dengan kesepakatan pada waktu itu tidak ada yang keberatan; - Memastikan Pokja PKP memahami isi dokumen LARAP dan proses penanganan WTP pada waktu itu

KAWASAN BUARAN – KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	TOPIK	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	KEGIATAN SKALA KAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> - WTP <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah total 64 KK b. 51 KK telah membuat pernyataan c. 13 KK belum membuat pernyataan dikarenakan mengikuti Kyai Pimpinan Ponpes, jika Pak Kyai sudah tanda tangan surat pernyataan maka yang lainnya akan mengikuti - IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokja belum berhasil bertemu dengan pimpinan pondok pesantren sehingga 13 WTP belum clear kesediaannya. Akan dijadwalkan dalam 1 minggu ke depan; - Ijin BBWS masih dalam tahap menunggu Rekomendasi Teknis turun 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas pendampingan ke PEMDA dan beberapa tokoh kunci ditingkatkan; - Rekomendasi Teknis segera dikomunikasikan ke BBWS prosesnya sampai dimana dan apakah bisa dipercepat untuk segera mengurus ijin pemanfaatan lahan ke kementerian PUPR Bidang SDA

NO.	TOPIK	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> a. Ada 2 lokasi di sisi utara dan sisi selatan b. IPAL sisi selatan lahan clear tersedia 500 m²; c. IPAL sisi utara lahan baru tersedia 300 m²; - Ijin lahan proses di BBWS 		